

■ Raibnya Uang Rp 22 Miliar, BTPN Harus Tanggung Jawab Itwil Selidiki Secara Internal

PELEBURAN- Pemkot Semarang akan memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat dalam kasus raibnya uang Pemkot senilai Rp22 miliar di Bank BTPN.

Hal itu disampaikan Walikota Semarang Hendrar Prihadi kepada *Wawasan* di Balaiikota, Rabu (25/3). Menurutnya, saat ini proses hukum terhadap kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

"Karenanya, kita serahkan dulu prosesnya ke teman-teman di kepolisian. Jika memang ada ok-

num PNS yang terbukti bersalah, tentu akan ada sanksi, bisa jadi sampai ke pemecatan. Tapi sementara, kita tunggu dulu penyelidikan polisi," terangnya.

Dijelaskan, Pemkot sebenarnya juga sudah melakukan penyelidikan internal terkait raibnya uang ini. Inspektorat Wilayah (Itwil) Pemkot Semarang bahkan sudah melakukan penyelidikan sejak dua pekan lalu.

Namun demikian, Hendi

Bersambung ke hal 21 kol 3



Hendrar Prihadi

Foto: dok

belum bisa membeberkan hasil penyelidikan yang dilakukan Itwil. Begitu pula kemungkinan adanya keterlibatan oknum PNS di dalamnya. "Sabar saja, semua sudah kita laporkan ke polisi. Biar mereka lakukan penyelidikan menyeluruh dulu," tukasnya.

■ Permasalahan

Sementara itu, permasalahan hilangnya uang kas daerah Kota Semarang, di dalam rekening bank BTPN merupakan kasus yang melibatkan BTPN secara insitusi perusahaan dan bukan permasalahan personal seseorang.

Karenanya, kuasa hukum Pemkot mengharapkan BTPN tidak membuat permasalahan yang ada menjadi tanggungjawab individu saja namun, bank sekaliber BTPN harus bertanggungjawab secara insitusi juga.

Kuasa Hukum Pemkot Semarang Jhon Ricard, kepada *Wawasan* Rabu (25/3) mengungkapkan, permasalahan lenyapnya uang nasabah bank bukan masalah perorangan namun permasalahan insitusi.

Sedangkan pengungkapan kasus lenyapnya uang Pemkot Semarang di BTPN terus dilakukan Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Saat ini Polisi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap saksi.

"Kita telah melayangkan surat pemanggilan kepada beberapa saksi untuk dimintai keterangan maksimal dua minggu kedepan," ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono, didampingi Kasat Reskrim AKBP Sugiarto.

Terkait berapa orang yang akan dipanggil, pihaknya tidak menyebutkan secara detail berapa dari 12 orang yang sebelumnya dimintai keterangan. "Sudah ada beberapa lah yang kita kirim surat untuk dimintai keterangan. Selama proses pemeriksaan saksi-saksi, kita juga mengumpulkan bukti-bukti pendukung," imbuhnya. ■ *hid/lek-Ks*